



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019

KEBUMEN, 31 JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dan menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa factor pendorong keberhasilan maupun kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun 2019 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja tahun berikutnya melalui perencanaan program dan kegiatan prioritas.

Kebumen, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

H. EDI Rianto, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19701101 199803 1 006

Jabatan		
Sekretaris	7	3/1/20
Tuanku	PR	3/1/20

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
2. Sumber daya manusia	3
3. Sarana dan Prasarana.....	4
4. Anggaran.....	5
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKjIP.....	5
 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	7
3. Program dan Kegiatan.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019.....	9
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	10
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	 11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	28
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2019.....	29
 BAB IV : PENUTUP.....	 33
 LAMPIRAN	
1. Daftar Penghargaan	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	66,67
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,75
		2. Capaian luas RTH perkotaan	17,45
		3. Indeks Kualitas Udara	77,50
		4. Indeks Kualitas Air	72,00
		5. Cakupan pelayanan sampah	42,84
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 didapat hasil sebagai berikut :

No	SasaranStrategis /Indikator Kinerja	Satu- an	Target 2019	Real- sasi	% Ca- paian	Tar- get. Akhir RPJ- MD	% Ca- paian trhdp Target Akhir RPJ- MD
I.	Sasaran 1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah					
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	66,67	32,27	48,40	100	32,27
II	Sasaran 2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/I ndeks	74,75	75,89	101,53	77,50	97,92
2	Luasan RTH Perkotaan	%	17,45	17,18	98,45	17,45	98,45
3	Indeks Kualitas Udara	%	77,50	88,44	114,12	79,00	111,9
4	Indeks Kualitas Air	%	72,00	63,33	87,96	76,00	83,33
5	Cakupan pelayanan sampah	%	42,84	68,88	160,78	42,94	160,4
	Rata-rata % capaian Sasaran 2				112,57		110,4
III.	Sasaran 3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat					
1	Cakupan Rumah Layak Huni	%	100	98,04	98,04	100	98,04

Penilaian atas capaian kinerja dengan menggunakan Skala ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indicator kinerja yang diperjanjikan tersebut, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indicator dapat tercapai sesuai target dan 4 (empat) indicator belum dapat tercapai sesuai target.

SASARAN	JUMLAH	PENCAPAIAN INDIKATOR			
	INDIKATOR	BS	B	C	K
1	1	-	-	-	1
2	5	3	2	-	-
3	1	-	1	-	-

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.
 - 1.1. Indiator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 66,67% baru dicapai 32,27% (% capaian 48,40% atau kategori “Kurang”).

Faktor penghambat belum tercapainya target penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen terutama disebabkan untuk penanganan kawasan kumuh memerlukan anggaran relatif besar yang dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2019 dari 213,622 Ha baru tertangani 68,944 ha, hal ini disebabkan alokasi anggaran sharing dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi belum sesuai dengan rencana, di samping itu adanya kendala permasalahan kepemilikan asset untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa yang lahannya bukan milik pemerintah.

Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya, di samping memprioritaskan anggaran APBD untuk penanganan kewenangan kabupaten. Untuk penanganan kawasan kumuh yang dilakukan dilokasi desa yang lahannya bukan milik pemerintah melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2.1. Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 74,75 realisasi 75,89% (% capaian 101,53% atau kategori “Baik Sekali”).

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indicator kinerja terutama dengan melaksanakan berbagai program yang mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama air dan udara, dengan sasaran peningkatan sarana prasarana, pemantauan lingkungan secara kontinyu, pelayanan pengolahan air limbah domestik, pembangunan ruang terbuka hijau, pelayanan persampahan, dan kegiatan penyadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus.

2.2. Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 17,45% realisasi 17,18 (% capaian 98,45% atau kategori “Baik”).

Faktor penghambat belum tercapainya indicator ini terutama terkait dengan lokasi maupun lahan, bahwa untuk penambahan luasan RTH di wilayah perkotaan tidak mudah dan mengalami kesulitan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan RTH public di kawasan perkotaan yang belum tertangani, di samping secara bertahap menambah luasan RTH sesuai skala prioritas.

2.3. Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.

Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target, dari target 77,50% realisasi dicapai 88,44% (% capaian 114,12% atau kategori “Baik Sekali”).

Beberapa factor pendorong keberhasilan indicator ini antara lain keberadaan ruang terbuka hijau dan tutupan hutan yang sangat menunjang kualitas udara di Kabupaten Kebumen, di samping keberhasilan program yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian polusi dan pencemaran udara termasuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

2.4. Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 72% baru dicapai 63,33% (% capaian 87,96% atau kategori “Baik”).

Faktor penghambat belum tercapainya indicator ini terutama disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic disebabkan masih adanya BAB sembarangan serta oleh limbah industry yang belum ditangani.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana dan pelayanan pengolahan air limbah domestic, kegiatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama pencemaran air.

2.5. Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.

Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,84% realisasi 68,88% (% capaian 160,78% atau kategori “Baik Sekali”).

Factor pendorong keberhasilan pencapaian indicator ini terutama berupa penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada maupun tenaga, peningkatan fasilitas TPA, penambahan rute angkutan dan area layanan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

3.1. Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 100% realisasi 98,04% (% capaian 98,04% atau kategori “Baik”).

Faktor penghambat belum tercapainya indicator ini terutama disebabkan bahwa jumlah RTLH di Kabupaten Kebumen sangat banyak, membutuhkan anggaran untuk penanganan cukup besar, sementara ketersediaan anggaran yang ada harus dialokasikan secara bertahap sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah provins, pemerintah pusat, swasta maupun sumber lainnya.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya (APBD Desa, komunitas, CSR, dll).

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, juga dilaksanakan evaluasi dan pengendalian secara berkala baik melalui rapat-rapat maupun mekanisme pelaporan.

- Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan (triwulanan), untuk triwulan 1 dilaksanakan pada Minggu II bulan April 2019, triwulan 2 pada Minggu II bulan Juli 2019, triwulan 3 pada Minggu II bulan Oktober 2019 dan untuk triwulan 4 pada Minggu II bulan Desember 2019, dengan materi evaluasi target dan realisasi kinerja keuangan dan pekerjaan, identifikasi permasalahan dan solusi yang dilakukan, dengan mengundang nara sumber dari instansi terkait.
- Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana kerja dan anggaran secara triwulanan, untuk triwulan 1 dilaporkan pada bulan April 2019, triwulan 2 pada bulan Juli 2019, triwulan 3 pada bulan Oktober 2019 dan untuk triwulan 4 pada Minggu I bulan Januari 2020, disertai dengan analisa factor pendorong keberhasilan dan penghambat apabila target tidak tercapai.

4. Akuntabilitas kinerja keuangan.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengelola anggaran sebesar Rp. 54.908.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.721.117.564 (92,37%), meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagai berikut :

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.717.825.000	8.562.530.801	98,22
2	Belanja Langsung	46.190.435.000	42.158.586.763	91,27
	Total	54.908.260.000	50.721.117.564	92,37

Dalam hal ini terdapat efisiensi sebesar 7,63%, dengan melakukan penghematan belanja barang dan jasa secara efektif dan efisien dan seluruh pekerjaan dapat direalisasikan dengan fisik 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagai entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang digunakan untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam laporan kinerja ini mencakup evaluasi dan pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja dan akuntabilitas keuangan serta identifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target maupun kendala dan permasalahan apabila target tidak dapat dicapai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah antara lain ::

1. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen atas pelaksanaan kinerjanya.
2. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabumen Tahun 2016-2021
3. Untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah dicapai dalam tahun 2019
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

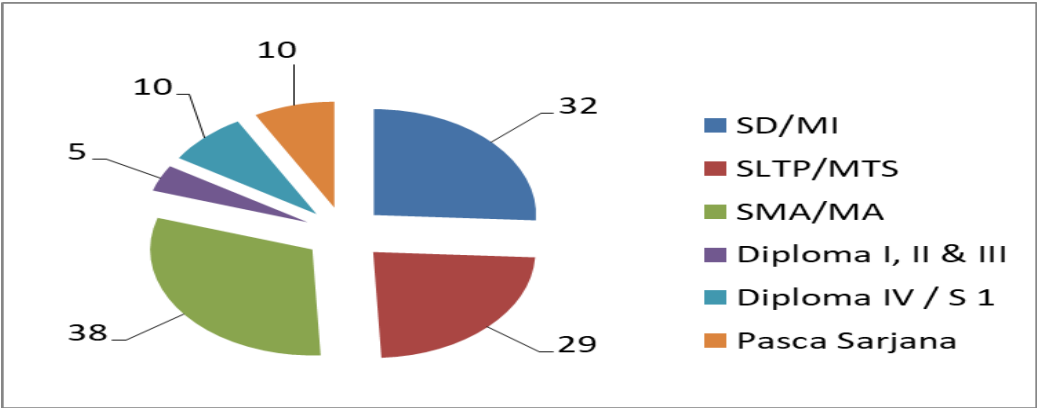
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan

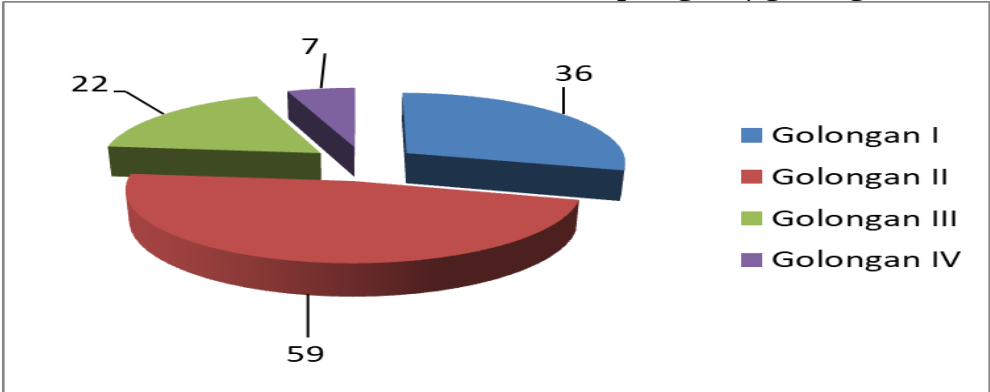
- kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya
2. Sumber Daya Manusia.

Sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2019, sejumlah 124 orang ASN.

Grafik : 1
Jumlah ASN berdasarkan pendidikan



Grafik 2
Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan



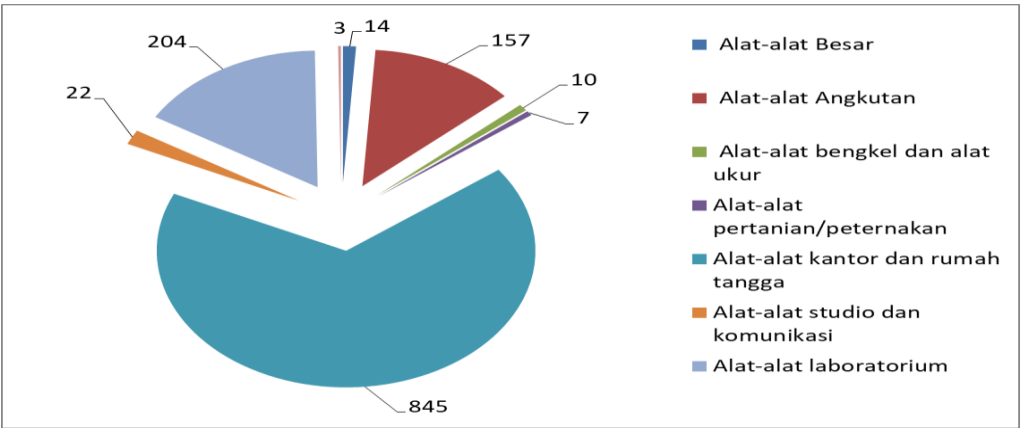
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagian besar dari tingkat SD/MI, SMP dan SLTA. Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan sebagian besar dari golongan I dan golongan II.

Dari jumlah ASN yang ada belum mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas khusus terutama untuk pelayanan kebersiha, kegiatan sanitasi dan kegiatan perumahan dengan menggunakan tenaga harian lepas (THL).

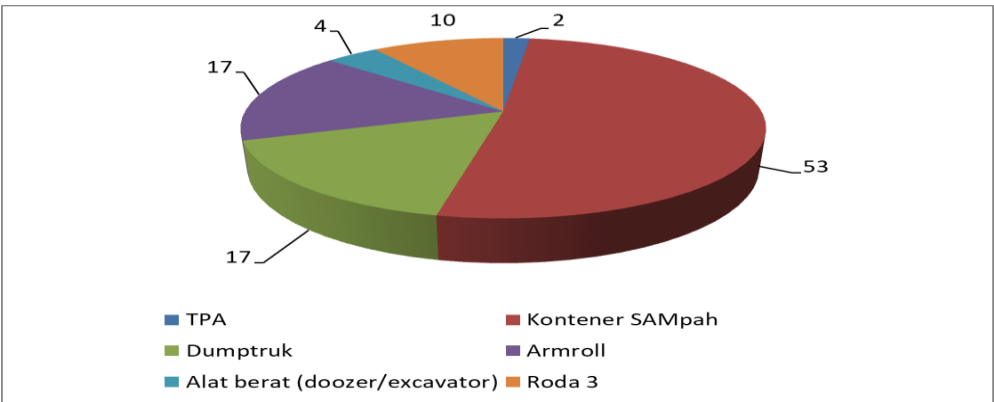
3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berupa personil/pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

Grafik 3
Sarana dan Prasarana kantor tahun 2019



Grafik 4
Sarana prasarana pelayanan persampahan



Sarana prasarana yang masih membutuhkan penambahan berupa alat-alat kantor terutama alat pengolahan data (laptop dan printer), di samping jumlahnya masih mengalami kekurangan, juga untuk mengganti peralatan yang kondisinya mengalami kerusakan disebabkan umur pakai Demikian juga dengan sarpras persampahan setiap tahun dilakukan penambahan untuk meningkatkan pelayanan..

4. Anggaran.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, mengelola anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.717.825.000	8.562.530.801	98,22
2	Belanja Langsung	46.190.435.000	42.158.586.763	91,27
	Total	54.908.260.000	50.721.117.564	92,37

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2019, sebagai berikut :

- BAB I :

PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi dan sistematika penyusunan LKjIP.
- BAB II :

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini menguraikan tentang rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2019.
- BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dan evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Tahun 2019.
- BAB IV :

PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Dan Misi

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Dalam rangkapencapaian visi dimaksud, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

Misi ke-1 : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

Misi ke-2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

Misi ke-3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

- Misi ke-4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- Misi ke-5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- Misi ke-6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama

Dari enam misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen untuk tahun 2016-2021, dikaitkan dengan visi dan misi Bupati, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Keterkaitan tujuan dan sasaran dengan Misi Bupati

Misi 3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Persentase peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Capaian luas RTH perkotaan
			Angka indeks kualitas udara
			Angka indeks kualitas air
			Cakupan pelayanan sampah
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni

Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD

3. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen meliputi 15 program dan 51 kegiatan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019.

Rencana kinerja tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021 dengan program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel : 3

Program dan anggaran tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.213.889.000
2	Program peningkatan sarpras aparatur	617.007.000
3	Program pengembangan data/informasi	67.333.000
4	Program pengembangan data/informasidan statistik daerah	15.843.000
5	Program pengembangan perumahan	1.481.933.000
6	Program lingkungan sehat perumahan	4.939.868.000
7	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2.970.600.000

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
8	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3.023.853.000
9	Program perlindungan dan konservasi SDA	295.519.000
10	Program rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan	1.190.200.000
11	Program peningkatanpengendalian polusi	356.472.000
12	Program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan	395.325.000
13	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	18.849.303.000
14	Program pengelolaan areal pemakaman	871.376.000
15	Program pengelolaan RTH	9.901.914.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	46.190.435.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2019 antara Bupati dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	66,67
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,75
		Capaian luas RTH perkotaan	17,45
		Indeks Kualitas Udara	77,50
		Indeks Kualitas Air	72,00
		Cakupan pelayanan sampah	42,84
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran sebagai bentuk pertanggungjawaban public.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

Skala ordinal dan kategori capaian

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2019, mencakup tiga sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, (2) meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam,

dan (3) meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Secara rinci capaian kinerja tahun 2019 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1, “Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah”, dengan indikator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan”.

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran.

Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombong (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Rincian lokasi penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan sd tahun 2019

NO.	KEWENANGAN	LUAS (Ha)	PENANGANAN	%	SISA (Ha)
I.	KABUPATEN	53,556	32,784	61,21	20,772
1	Wonokriyo	2,197	2,197	100	-
2	Piarangan	4,346	4,346	100	-
3	Karanganyar	0,506	0,506	100	-
4	Kawedusan	0,091	0,091	100	-
5	Bumirejo	5,280	5,280	100	-
6	Kutosari	5,421	4,791	88,38	0,630
7	Selang	5,295	5,295	100	-
8	Tamanwinangun	0,964	0,964	100	-
9	Kebumen	9,040	9,040	100	-
10	Gemeksekti	0,274	0,274	100	-
11	Kuwarisan	7,410	-	-	7,410
12	Lundong	6,343	-	-	6,343
13	Bagung	6,389	-	-	6,389
II.	PROVINSI	47,807	36,160	75,64	11,647
14	Gombong	14,516	14,516	100	-
15	Candi	10,647	10,647	100	-
16	Panjer	10,997	10,997	100	-
17	Mekarsari	11,647	-	-	11,647
III.	PUSAT	112,259	-	-	112,259
18	Kutowinangun	26,324	-	-	26,324
19	Tersobo	24,467	-	-	24,467
20	Prembun	32,706	-	-	32,706
21	Kabekelan	28,762	-	-	28,762
	JUMLAH	213,622	68,944	32,27	144,678

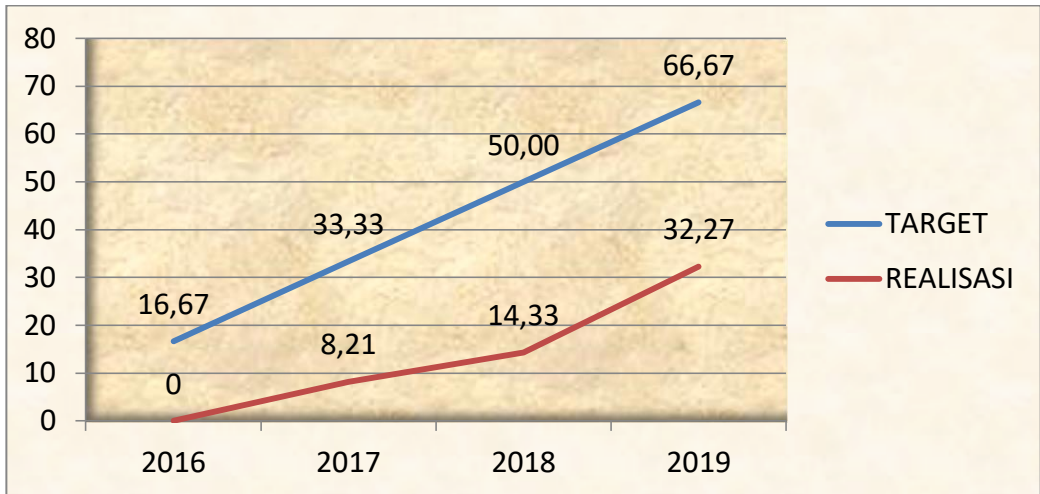
Pencapaian kinerja prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan Tahun 2019, dari total permukiman kumuh perkotaan seluas 213,622 Ha, tertangani 68,944 Ha (32,27%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 7
 Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2019

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	14,33	66,67	32,27	48,40	100

Perbandingan capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 5
 Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2016-2019



Rendahnya prosentase capaian penanganan kawasan kumuh, terutama disebabkan anggaran penanganan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang relative besar dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat belum sesuai dengan rencana, di samping itu untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi (APBD provinsi) dan pusat (APBN dan DAK).

Untuk penanganan kawasan kumuh tahun 2019 didukung dengan program lingkungan sehat perumahan pada kegiatan penanganan

kawasan kumuh perkotaan bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 4.949.868.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.884.061.880,- (98,87%). Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,13% berasal dari penghematan belanja barang/jasa dan belanja modal kegiatan penanganan kawasan kumuh.

Di samping itu, didukung dengan alokasi anggaran DAK sebesar Rp. DAK dan APBN sebesar Rp. 26.693.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.693.750.000,- (100%).

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya yaitu dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

2. Sasaran 2, “Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam”

a. Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (IKU Daerah).

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Daerah menggunakan 2 (dua) parameter yaitu Angka Indeks Kualitas Udara dan Angka Indeks Kualitas Air (tidak memasukkan

angka indeks tutupan vegetasi karena merupakan urusan provinsi). Rentang status klasifikasi nilai IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel 8
Rentang klasifikasi nilai IKLH

Rentang	Klasifikasi
IKLH > 80	Sangat Baik
70 < IKLH ≤ 80	Baik
60 < IKLH ≤ 70	Cukup Baik
50 ≤ IKLH ≤ 60	Kurang Baik
40 ≤ IKLH > 50	Sangat Kurang Baik
30 ≤ IKLH > 40	Waspada

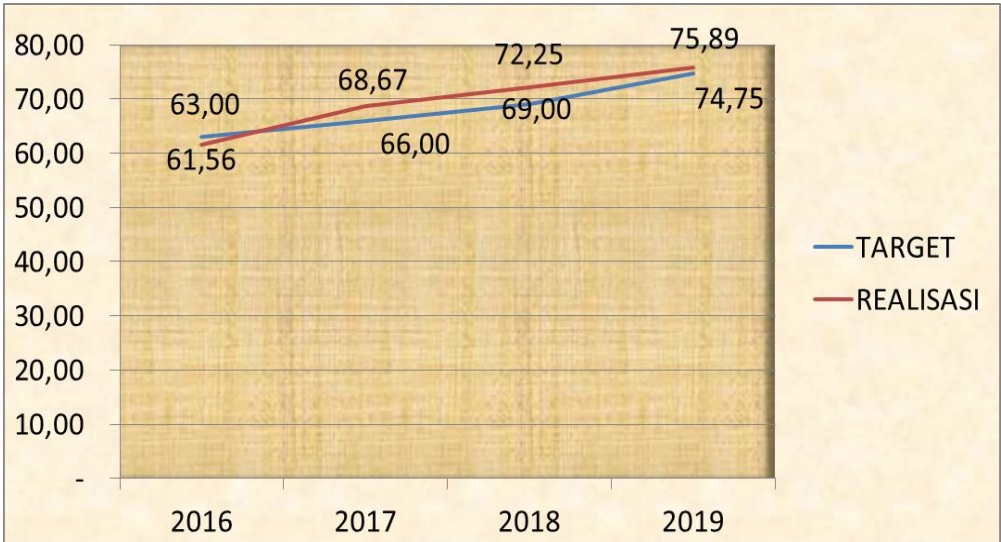
Sumber Buku IKLH Nasional.

Capaian IKLH Tahun 2019 dengan parameter Angka Indeks Kualitas Udara = 88,44 dan Angka Indeks Kualitas Air = 63,33, total = 151,77/2 = 75,89, sebagai berikut :

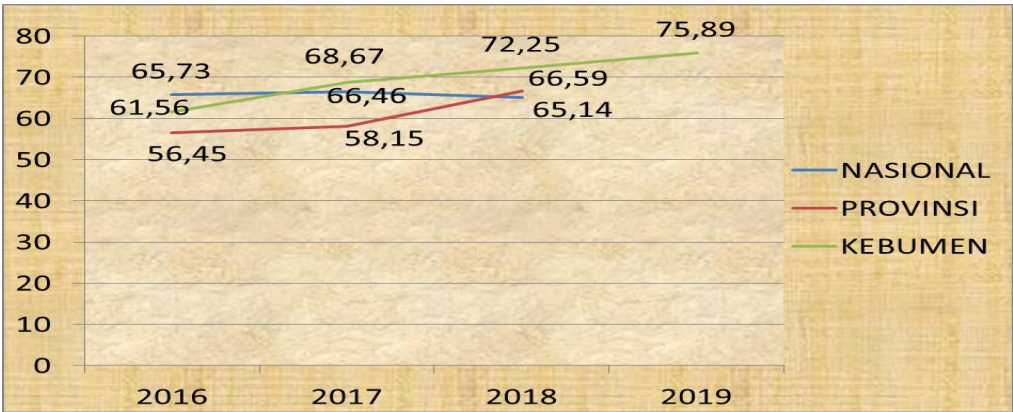
Tabel 9
Capaian IKLH Tahun 2019

Indikator	Realisasi 2018	2019			Target Akhir RPJMD	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,25	74,75	75,89	101,53	77,50	97,92

Grafik 6
Target dan capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2016-2019.



Grafik 7
Perbandingan dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



IKLH Provinsi dan Nasional tahun 2019 belum dapat disandingkan (belum dipublikasikan).

Upaya nyata yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian target IKLH meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, penanganan limbah B3, pengawasan ketaatan kegiatan usaha, penilaian dan pengkajian ijin lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), pendampingan penyusunan perdes di bidang lingkungan, peningkatan sarpras laboratorium, penyediaan sarpras pengendalian lingkungan (biopori), pengembangan keanekaragaman hayati, pelaksanaan car free day secara berkala, bantuan bibit tanaman konservasi, pengembangan kampung iklim, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, peningkatan pelayanan dan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pembangunan IPAL industry kecil dan instalasi biogas, penyuluhan/sosialisasi pengendalian polusi dan pencemaran, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKLH antara lain, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic oleh budaya BAB sembarangan dan oleh limbah industry, dimana beberapa parameter kualitas air sungai masih diatas baku mutu. Demikian juga dengan kualitas udara berpotensi mengalami penurunan seiring dengan semakin tingginya

aktifitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah moda transportasi.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan pencapaian target akhir RPJMD yaitu dengan melanjutkan kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terutama pencemaran air dan udara sebagai parameter utama penghitungan IKLH.

Program yang mendukung pencapaian indikator IKLH tahun 2019 yaitu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program peningkatan pengendalian polusi, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan total anggaran Rp. 18.133.883.000,- dan realisasi 16.408.579.754,-

Dalam hal ini terjadi penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.725.303.246,- (9,51%) yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

b. Capaian luas RTH perkotaan.

RTH merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota yang memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, terutama sebagai penghasil oksigen dan sebagai kawasan resapan air. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah (20% RTH Publik dan 10% RTH Private).

Formulasi penghitungan capaian luas RTH perkotaan sebagai berikut :

Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)	
-----	X 100%
Luas wilayah perkotaan (Ha)	

Pencapaian kinerja Capaian Luas RTH Perkotaan Tahun 2019, dari total luas wilayah perkotaan seluas 4.259,62 Ha, RTH public existing 731,99 (17,18%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10
Capaian luas RTH perkotaan tahun 2019

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Capaian luas RTH Perkotaan	%	17,18	17,45	17,18	98,45	17,45

Secara rinci data capaian RTH perkotaan sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

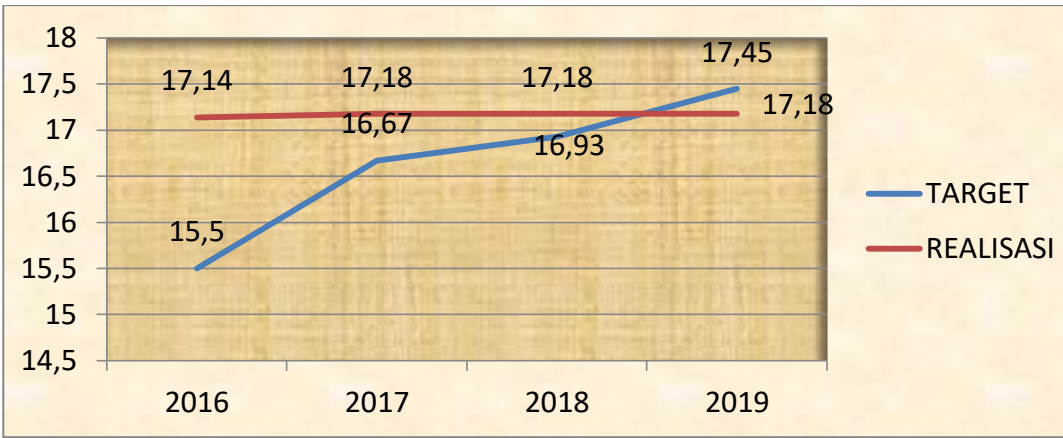
Tabel : 11
Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2019

NO	WILAYAH	LUAS KAWAS-AN PERKO-TAAN/ HPL (Ha)	RTH_EKSIS-TING	LUAS (Ha)	CAPAI-AN (%)
1	Gombong	1785,81	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Su-ngai	3,13 19,57 21,42 180,77	12,59
2	Karanganyar	483,32	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Su-ngai	224,89 3,08 9,12 7,17 61,40	
3	Kebumen	1234,38	Alun-Alun Batas Kota Hutan Kota Lapangan Islam Center Makam Median Jalan Pasar Hewan Pulau Jalan Sempadan KA Sempadan Sa-luran Induk Sempadan Su-ngai Stadion Taman Taman Jalan Taman Parkir	80,77 3,93 0,41 3,32 0,17 46,43 1,40 0,10 0,14 18,21 14,70 179,56 3,77 5,57 2,35 1,29	16,71
4	Kutowina-ngun	455,33	Lapangan	281,35 3,56	22,79

NO	WILAYAH	LUAS KAWAS-AN PERKO-TAAN/ HPL (Ha)	RTH_EKSIS-TING	LUAS (Ha)	CAPAI-AN (%)
4	Prembun	300,78	Makam	15,89	22,11
			Sempadan KA	3,54	
			Sempadan Su-ngai	77,68	
			Lapangan	100,67	
			Makam	0,48	
			Taman	9,10	14,73
			Sempadan KA	0,82	
			Sempadan Su-ngai	2,54	
				31,37	
				44,31	
	TOTAL	4.259,62		731,99	17,18

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :

Grafik 8
 Capaian luas RTH perkotaan tahun 2016-2019



Capaian luas RTH perkotaan tahun 2019 tidak terdapat penambahan luasan, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan masih prioritaskan untuk peningkatan kualitas RTH yang sudah ada dan untuk pemeliharaan sarana prasarana RTH di wilayah perkotaan (Kebumen, Prembun, Karanganyar dan Gombong). Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD, diupayakan dengan melakukan penambahan luasan RTH, di samping tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang sudah dibangun.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung indicator ini yaitu program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan program pengelolaan areal pemakaman dengan anggaran sebesar Rp. 9.901.914.000 dan realisasi Rp. 8.607.978.679 (86,93%).

Terdapat penghematan sebesar 13,07% berasal dari efisiensi belanja pengadaan barang/jasa dan belanja modal.

c. Angka indeks kualitas udara.

Indeks kualitas udara merupakan bahasa yang informant dan mudah dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan pcrubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Pemantauan kualitas udara secara kontinyu di suatu perkotaan menjadi sangat penting guna mengetahui indikasi-indikasi adanya perubahan yang signifikan tentang kualitas udara dan guna masukan-masukan bagi perencanaan tentang udara bersih.

Indeks kualitas udara di Kabupaten Kebumen dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

dimana:

IPU

= Indeks Pencemaran Udara

IP_{NO₂}

= Indeks Pencemar NO₂

IP_{SO₂}

= Indeks Pencemar SO₂

Capaian indeks kualitas udara tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12

Capaian indeks kualitas udara tahun 2019

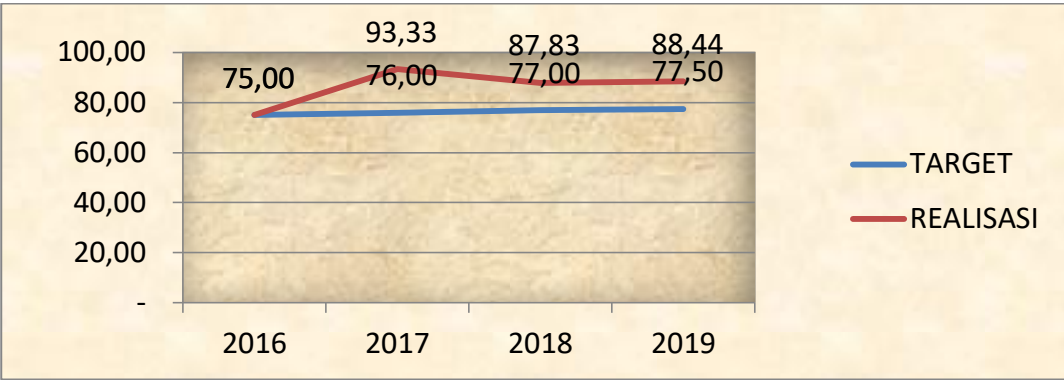
Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	10,90	40,00	0,2724
SO2	6,88	20,00	0,3439
Rata-Rata			0,3082
Indeks Udara			88,44

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	87,83	77,50	88,44	114,12	79,00

Angka indek pencemaran udara di Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dengan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.

Grafik 9

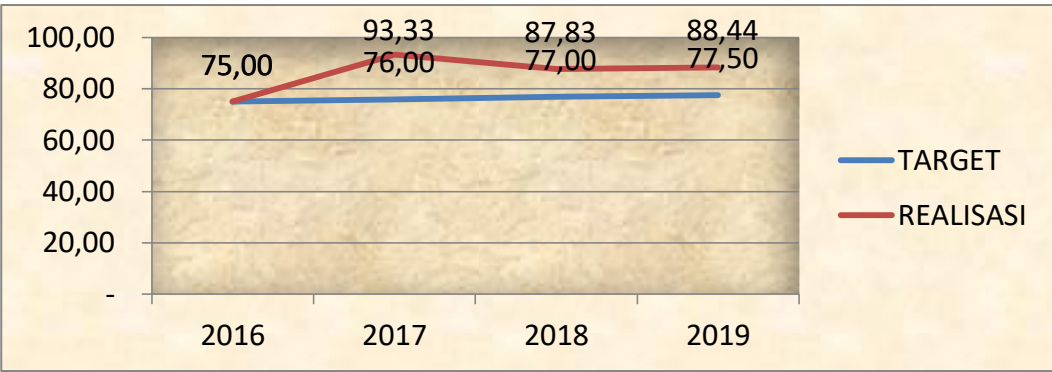
Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2019



Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 10

Perbandingan dengan capaian Provinsi dan Nasional



Data capaian tahun 2019 untuk nasional dan provinsi belum dapat disandingkan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mempertahankan agar indeks kualitas udara tidak mengalami penurunan seiring dengan semakin tingginya aktifitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah moda transportasi, dengan mengurangi perilaku negative masyarakat yang dapat mengurangi kualitas udara (kebiasaan membakar sampah, gas buang kendaraan diatas ambang batas, dll).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indicator ini yaitu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan anggaran sebesar Rp. 14.411.486.000 dan realisasi Rp. 12.988.025.815 (90,12%). Terdapat penghematan penggunaan

anggaran sebesar 9,88% berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

d. Angka indeks kualitas air.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, sehingga kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks kualitas air sungai Kabupaten Kebumen dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Total Fosfat, Total Coli dan Fecal Coli. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan. Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air, sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

dimana:
(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij
(Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Capaian indeks kualitas air tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 13

Capaian indeks kualitas air tahun 2019

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	8	1	70,00	46,67
Ringan	4		50,00	16,67
Sedang	-	-	30,00	-
Berat	-	-	10,00	-
Nilai Indeks Penc. Air				63,33

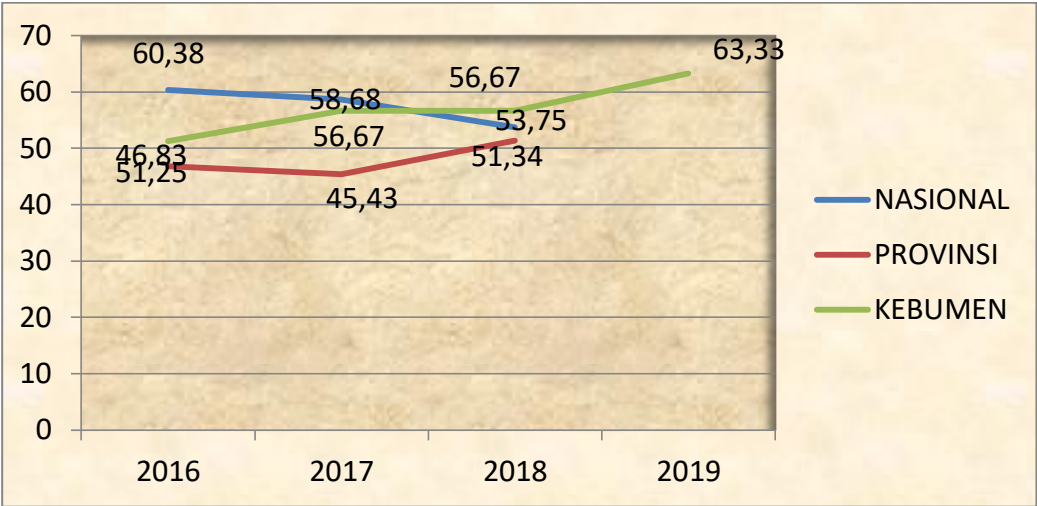
No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Point/ indeks	56,67	72,00	63,33	87,96	76,00

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa parameter di atas baku mutu terutama unsur kandungan deterjen.

Perbandingan capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 11

Perbandingan capaian dengan provinsi dan nasional



Data capaian tahun 2019 untuk nasional dan provinsi belum dapat disandingkan/ belum dipublikasikan.

Capaian indeks kualitas air tahun 2019 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hal tersebut diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestic disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry. Dari hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen, beberapa parameter masih diatas baku mutu.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana

prasarana dan pelayanan pengelolaan air limbah domestic serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kualitas air dengan mengelola limbah sesuai dengan anjuran. Program yang dilaksanakan untuk mendukung indicator ini yaitu program pengendalian polusi, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan anggaran Rp. 7.480.172.000 dan realisasi Rp. 7.094.723.869 (94,85). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 5,15% berasal efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

e. Cakupan pelayanan sampah.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Formulasi penghitungan cakupan pelayanan sampah sebagai berikut :

Jumlah sampah yg tertangani

Jumlah produksi sampah

x 100%

Capaian indicator Cakupan Pelayanan Sampah tahun 2019, dengan jumlah produksi sampah 278,78 m3/hr, tertangani 192,01 m3/hr (68,88%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14
Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2019

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Pelayanan Sampah	%	51,93	42,84	68,88	160,78	42,94

Rincian realisasi kinerja cakupan pelayanan sampah tahun 2019 berdasarkan wilayah sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 15

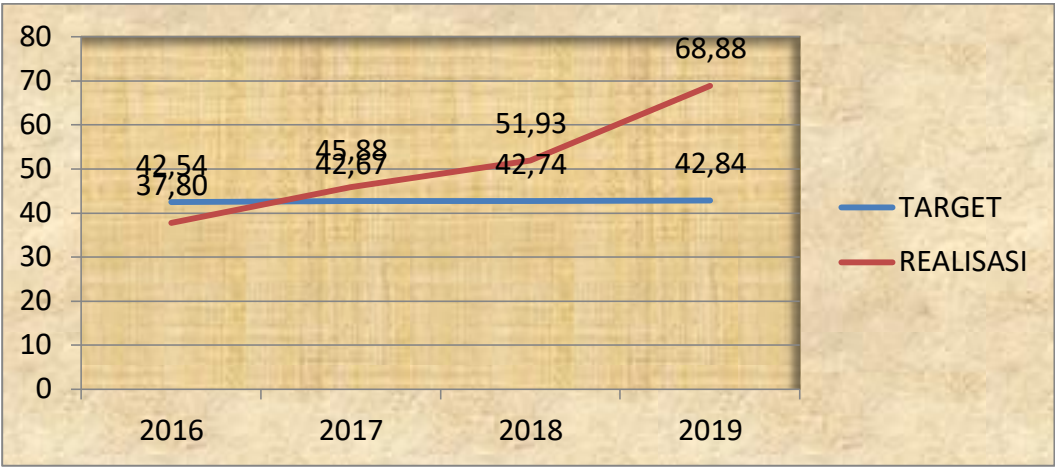
Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2019

No	Wilayah perkotaan	Jumlah Desa/Kelurahan kawasan perlotaan	Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan Terlayani s/d 2019	Jumlah Penduduk desa /Kelurahan di Kawasan Perkotaan (Jiwa)	Timbul-an Sampah yg Dihasilkan (m3/hr)	Timbul an sampah yg terangk ut ke TPA (m3/hr)	Persentase sampah yg terangk ut ke TPA (%)
1	Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Prembun	43	32	180.019	278,78	192,01	68,88%

Perbandingan capaian indicator kinerja tahun 2019 dan tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 12

Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2019



Dari grafik tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah dapat tercapai sesuai dengan target, hal tersebut ditunjang dengan semakin meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada, peningkatan fasilitas TPA dan penambahan rute angkutan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah terutama produksi sampah semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, di samping kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan sampah yang benar (budaya buang sampah sembarangan, pengolahan sampah rumah tangga masih terbatas).

Upaya yang dilakukan di samping dengan meningkatkan

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberdayaan bank sampah di tingkat desa/kelurahan, mengoptimalkan fungsi TPS3R, dan pengolahan sampah rumah tangga).

Program untuk mendukung indikator ini yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 18.849.303.000 dan realisasi Rp. 16.802.518.784 (89,14%). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 10,86%, berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

2. Sasaran 3 : “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”.

Sasaran ke-3 dengan indikator sasaran : Cakupan rumah layak huni.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.908 unit, dimana pada RPJMD Tahun 2016-2021 ditargetkan akan dituntaskan pada tahun 2019. Formulasi penghitungan cakupan rumah layak huni sebagai berikut :

Jumlah rumah layak huni (unit)

Jumlah rumah (unit)

X 100%

Capaian indikator Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2019, dari total rumah 26.860 unit, rumah layak huni sejumlah 20.848 (98,04%) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16
Capaian cakupan rumah layak huni tahun 2019

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2018	2019			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Rumah Layak Huni	%	97,67	100	98,04	98,04	100

Perbandingan capaian kinerja cakupan rumah layak huni tahun sebelumnya sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 13

Capaian RLH tahun 2016-2019



Sampai dengan akhir tahun 2019, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 20.848 unit, sehingga masih tersisa 6.012 unit yang harus diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021

Kendala yang dihadapi dalam penanganan RTLH terutama terkait dengan pembiayaan, dimana anggaran yang disalurkan oleh pemerintah merupakan dana stimulan, sehingga sangat diperlukan dukungan berupa swadaya masyarakat.

Upaya yang dilakukan dengan mengupayakan dukungan anggaran untuk penanganan RTLH dari berbagai sumber, di samping dari APBD Kabupaten, juga APBD Provinsi, APBN, DAK, APBDes maupun sumber pendanaan lainnya. Penanganan RTLH tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17

Alokasi anggaran penanganan RTLH Tahun 2019

No.	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	P2MKM	6.780.000.000	6.760.000.000	99,71
2	DAK	2.835.000.000	2.765.000.000	97,53
3	Bankeu Provinsi	13.470.000.000	13.470.000.000	100
4	BSPS	9.625.000.000	9.625.000.000	100
5	CSR / Komunitas	750.000.000	750.000.000	100
6	APBDes	21.260.000.000	21.260.000.000	100
Jumlah Total		58.464.195.000	54.630.000.000	93,44

Tidak terserapnya alokasi anggaran yang telah disediakan, terutama

disebabkan adanya calon penerima bantuan yang tidak siap melaksanakan dan mengundurkan diri.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

1. Evaluasi Kinerja.
Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, juga dilaksanakan evaluasi dan pengendalian secara berkala baik melalui rapat-rapat maupun mekanisme pelaporan.
 - Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan (triwulanan), untuk triwulan 1 dilaksanakan pada Minggu II bulan April 2019, triwulan 2 pada Minggu II bulan Juli 2019, triwulan 3 pada Minggu II bulan Oktober 2019 dan untuk triwulan 4 pada Minggu II bulan Desember 2019, dengan materi evaluasi target dan realisasi kinerja keuangan dan pekerjaan, identifikasi permasalahan dan solusi yang dilakukan, dengan mengundang nara sumber dari instansi terkait.
 - Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana kerja dan anggaran secara triwulanan, untuk triwulan 1 dilaporkan pada bulan April 2019, triwulan 2 pada bulan Juli 2019, triwulan 3 pada bulan Oktober 2019 dan untuk triwulan 4 pada Minggu I bulan Januari 2020, disertai dengan analisa factor pendorong keberhasilan dan penghambat apabila target tidak tercapai.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator tersebut, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator dapat tercapai sesuai target, 4 (empat) indikator belum dapat tercapai sesuai target, sebagai berikut :

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PENCAPAIAN INDIKATOR			
		BS	B	C	K
1	1	-	-	-	1
2	5	3	2	-	-
3	1	-	1	-	-

Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.

2.1.1. Indikator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 67,33% baru dicapai 32,37% (% capaian 48,40 atau kategori “Kurang”).

2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2.2.1. Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 74,75 realisasi 75,89% (% capaian 101,53% atau kategori “Baik Sekali”).

2.2.2. Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 17,45% realisasi 17,18 (% capaian 98,45% atau kategori “Baik”).

2.2.3. Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.

Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target, dari target 77,50% realisasi dicapai 88,44% (% capaian 114,12% atau kategori “Baik Sekali”).

2.2.4. Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 72% baru dicapai 63,33% (% capaian 87,96% atau kategori “Baik”).

2.2.5. Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,84% realisasi 68,88% (% capaian 160,78% atau kategori “Baik Sekali”).

2.3. Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

2.3.1. Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 100% realisasi 98,04% (% capaian 98,04% atau kategori “Baik”).

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kebumen, pada tahun anggaran 2019 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.717.825.000	8.562.530.801	98,22
2	Belanja Langsung	46.190.435.000	42.158.586.763	91,27
	Total	54.908.260.000	50.721.117.564	92,37

Rincian realisasi anggaran per belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19
Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
		Rp	Rp	%	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.579.741.000	6.466.277.698	98,28	100
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.099.566.000	2.074.473.103	98,80	100
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.518.000	21.780.000	56,54	100
		8.717.825.000	8.562.530.801	98,22	100

Tabel 20
Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
		Rp	Rp	%	%
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.960.000	3.960.000	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.118.000	90.716.763	91,52	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	173.285.000	162.576.963	93,82	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.118.000	87.846.350	98,57	100

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi	
				Keuan gan	Fisik
		Rp	Rp	%	%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.461.000	53.820.175	98,82	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.426.000	6.647.000	89,51	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.216.000	79.215.791	100	100
8	Penunjang Administrasi Perkantoran	505.800.000	497.468.000	98,35	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64.363.000	42.310.000	65,74	100
10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.804.000	19.087.850	96,38	100
11	Penyediaan alat tulis kantor	39.608.000	39.147.900	98,84	100
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.706.000	28.875.100	97,20	100
13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.426.000	7.416.000	99,87	100
14	Penyediaan makanan dan minuman	40.598.000	40.431.600	99,59	100
II.	Program peningkatan sarpras aparatur				
15	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	183.682.000	181.600.000	98,87	100
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	64.510.000	54.781.685	84,92	100
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	206.342.000	201.970.000	97,88	100
18	Pengadaan mebeleur	100.010.000	98.544.500	98,53	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.522.000	56.477.500	99,92	100
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.941.000	5.940.000	99,98	100
III.	Program pengembangan data/informasi				
21	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	67.333.000	62.821.190	93,30	100
IV.	Program pengembangan data/informasidan statistik daerah				
22	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	15.843.000	15.601.500	98,48	100
V.	Program pengembangan perumahan				
23	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1.481.933.000	1.465.076.025	98,86	100
VI.	Program lingkungan sehat perumahan				
24	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	4.939.868.000	4.884.061.880	98,87	100
VII.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				
25	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	2.970.600.000	2.714.676.733	91,38	100
VIII.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	495.100.000	479.973.326	96,94	100
27	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	84.167.000	82.505.759	98,03	100
28	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	565.513.000	562.198.000	99,41	100
29	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	175.000.000	171.448.637	97,97	100
30	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	548.530.000	543.206.197	99,03	100
31	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang		108.443.060	99,56	100

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
				%	%
	lingkungan hidup	108.922.000			
32	Pengkajian dampak lingkungan	198.040.000	193.843.082	97,88	100
33	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	551.521.000	508.384.967	92,18	100
34	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	297.060.000	272.062.579	91,59	100
IX.	Program perlindungan dan konservasi SDA				
35	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	295.519.000	292.897.124	99,11	100
X.	Program rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan				
36	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	1.190.200.000	1.165.084.405	97,89	100
XI.	Program peningkatan pengendalian polusi				
37	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	267.354.000	264.320.000	98,87	100
38	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	89.118.000	84.160.782	94,44	100
XII.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan				
39	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	98.265.000	92.583.744	94,22	100
40	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	227.746.000	199.936.297	87,79	100
41	Pengembangan data dan informasi lingkungan	69.314.000	64.876.383	93,60	100
XIII.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				
42	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	11.553.257.000	10.338.076.337	89,48	100
43	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	6.419.852.000	5.657.859.190	88,13	100
44	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	99.020.000	86.998.809	87,86	100
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	777.174.000	719.584.448	92,59	100
XIV.	Program pengelolaan areal pemakaman				
46	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman	79.216.000	45.466.553	57,40	100
47	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	693.140.000	622.142.000	89,76	100
48	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	99.020.000	93.485.900	94,41	100
XV.	Program pengelolaan RTH				
49	Penyusunan program pengembangan RTH	247.550.000	165.089.250	66,69	100
50	Penataan RTH	4.454.834.000	3.992.727.000	89,63	100
51	Pemeliharaan RTH	5.199.530.000	4.450.162.429	85,59	100
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	46.190.435.000	42.158.586.763	91,27	100

Dalam hal ini untuk belanja langsung terdapat penghematan sebesar 8,73%, berasal dari efisiensi belanja barang/jasa dan belanja modal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan target, dimana 3 (tiga) indikator dapat tercapai sesuai target sedangkan 4 (empat) indikator belum dapat tercapai sesuai target.

Beberapa factor pendorong keberhasilan maupun kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun 2019 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya melalui perencanaan program/kegiatan prioritas.



Kebumen, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

H. EDI RIANTO, ST, MT

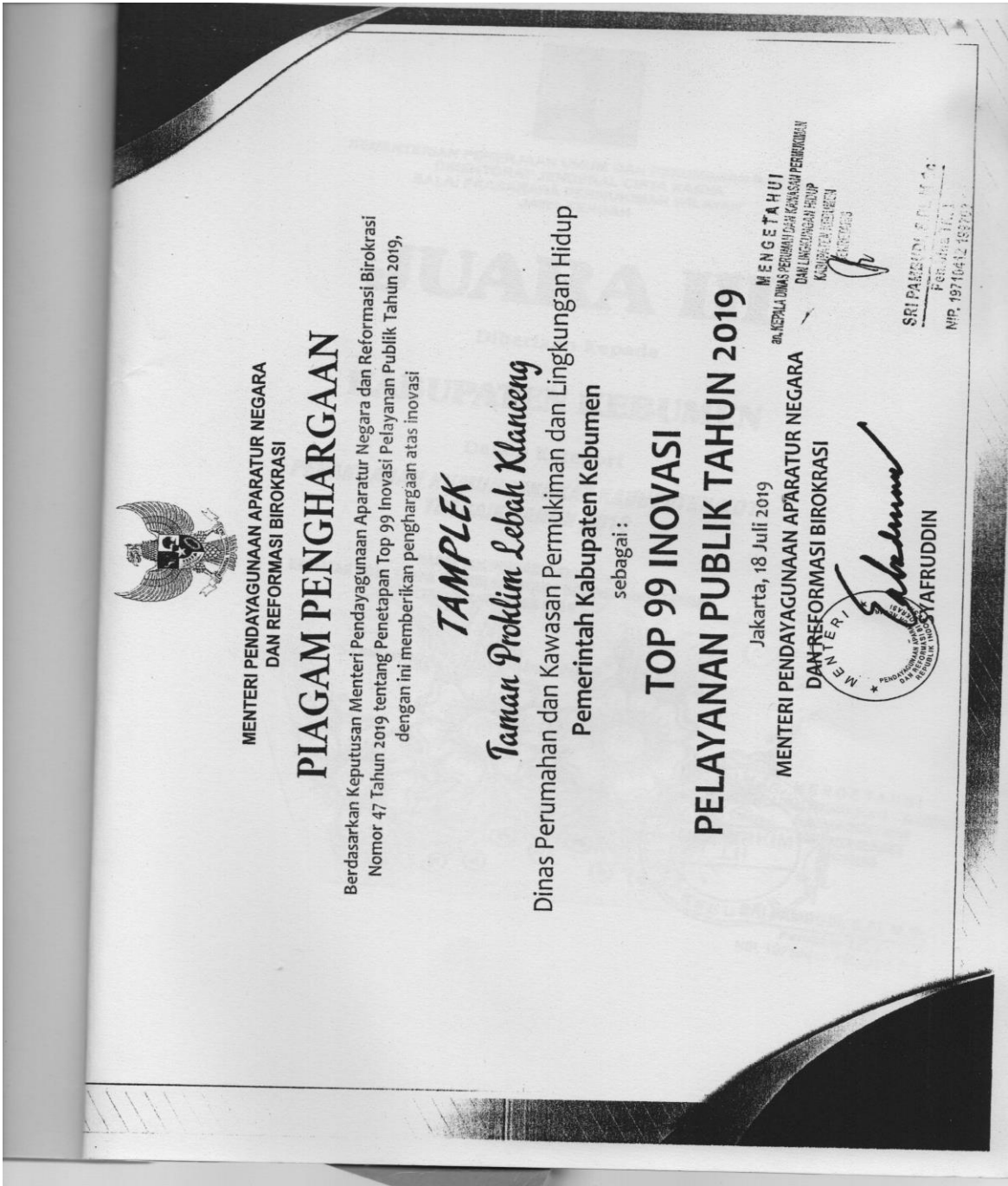
Pembina Tk. I

NIP. 19701101 199803 1 006

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		24/1/20
Ketubag		31/1/20

DAFTAR PENGHARGAAN tahun 2019.

1. Top 99 tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi pelayanan public “Tamplek”.
2. Juara 3 Pengelolaan Anggaran Kotaku Terbaik tk. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
JAWA TENGAH

JUARA III

Diberikan Kepada

KABUPATEN KEBUMEN

Dalam Kategori

**PENANGANAN KUMUH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TERBAIK TAHUN 2019**

RAPAT KOORDINASI AKHIR
KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Semarang, 27 November 2019



MENGETAHUI
KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
JAWA TENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIS
KEPADA
SRI BAMBUDI, S.Pi. M.Sc
Pembina TK. I
NIP. 19710412 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pahlawan No.98 Telp (0287) 381518 – 381989 Kebumen 54311

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Edi Rianto, ST, MT.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KH. Yazid Mahfudz
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kebumen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kebumen, Oktober 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KH. YAZID MAHFUDZ

H. EDI RIANTO, ST, MT.
NIP. 19701101 199803 1 006

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	2	
Asisten	2	
Kabag	019	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sebelum perubahan	Target setelah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	66,67	66,67	14,33	36,65	63,19	66,67
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,75	74,75	72,25	72,65	73,79	74,75
		Capaian luas RTH perkotaan	17,45	17,45	17,18	17,27	17,36	17,45
		Angka Indeks Kualitas Udara	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
		Angka Indeks Kualitas Air	72,00	72,00	56,67	59,79	67,78	72,00
		Cakupan pelayanan sampah	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100	100	97,67	98,28	99,06	100

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.218.934.000	1.213.889.000	APBD Kab
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	568.007.000	617.007.000	APBD Kab
3	Pengembangan data/informasi	67.333.000	67.333.000	APBD Kab
4	Pengembangan data/Informasi/statistik daerah	15.843.000	15.843.000	APBD Kab

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
5	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	19.171.803.000	18.849.303.000	APBD Kab
6	Pengembangan perumahan	1.481.933.000	1.481.933.000	APBD Kab
7	Lingkungan sehat perumahan	4.939.868.000	4.939.868.000	APBD Kab
8	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.395.498.000	3.023.853.000	APBD Kab
9	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	195.519.000	295.519.000	APBD Kab
10	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	990.200.000	1.190.200.000	APBD Kab
11	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	371.325.000	395.325.000	APBD Kab
12	Pengelolaan areal pemakaman	871.376.000	871.376.000	APBD Kab
13	Peningkatan pengendalian polusi	356.472.000	356.472.000	APBD Kab
14	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12.941.914.000	9.901.914.000	APBD Kab
15	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2.970.600.000	2.970.600.000	APBD Kab
16	Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)	6.784.195.000	6.784.195.000	APBD Kab
17	DAK Bidang Perumahan	2.972.290.000	2.972.290.000	DAK
18	DAK Bidang Sanitasi	6.492.000.000	6.492.000.000	DAK
19	DAK Bidang Lingkungan Hidup	300.000.000	300.000.000	DAK



Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

H. EDI RIANTO, ST, MT.
NIP. 19701101 199803 1 006

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten		
Kabag	